BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Pekanbaru, 5 September 2024

Nomor : 116/HK.01/K.RA/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Riau
di-

Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tertanggal 30 Agustus 2024 perihal Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Walikota.

B. Berkenaan dengan pelaksanaan Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024 dan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Ketentuan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan :
   a. Ayat (3) : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
      1) menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
      2) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
   b. Ayat (4) : Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
   c. Ayat (5) : Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menegaskan bahwa Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menegaskan bahwa dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikecualikan :

a. Gaji pokok;
b. Tunjangan jabatan;
c. Tunjangan keluarga;
d. Tunjangan beras;
e. Tunjangan kesehatan;
f. Tunjangan kecelakaan kerja; dan
g. Tunjangan kematian.

C. Berkenaan dengan Penerapan Asas Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 1 Halaman 3 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 menegaskan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat;
   b. Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;
   c. Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislative, dan/atau calon presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/Gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislative, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
e. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa *posting*, memberikan komentar (*comment*), membagikan *link* atau tautan (*share*), memberikan *like* dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden;
f. Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegaiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden; dan
g. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden.

2. Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 2 Halaman 4 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 menegaskan bahwa dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
3. Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 3 Halaman 4 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 menegaskan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang di wilayah kerjanya terdapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024 (Petahana) , untuk :

1. Membuat Imbauan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud agar segera mengajukan Cuti di Luar Tangguran Negara bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024 yang di wilayah kerjanya terdapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024;
2. Membuat Imbauan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud selama menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara agar tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya selain yang dikecualikan dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang di wilayah kerjanya terdapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024 (Petahana);
3. Imbauan sudah harus dikirimkan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud paling lambat di tanggal 10 September 2024 dikarenakan berdasarkan frasa ***"paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, yaitu di tanggal 12 September 2024, Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali dalam Pilkada Tahun 2024;

E. Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang di Wilayah kerjanya terdapat bakal calon Kepala Daerah yang suami atau istrinya berstatus Aparatur Sipil Negara untuk membuat Imbauan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah agar mematuhi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;

Demikan instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

Ketua Bawaslu Provinsi Riau,



A l n o f r i z a l

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN